



Pengaruh Program Bansos Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang

Chres Dian Veronika Zalukhu¹, Fani Izwar², Syamsir³, Nia Aprilian⁴, Riska Dwi Cahyani⁵, Syakira Mishwa Hanifah⁶

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dianzalukhu13@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, faniizwar06@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, syamsirsaili@yahoo.com

⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, niaafriilian0804@gmail.com

⁵Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, riska@gmail.com

⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, haramishwa@gmail.com

Corresponding Author: dianzalukhu13@gmail.com¹

Abstract: *In Padang City, poverty is a significant situation where a person or group of people is unable to achieve their basic needs. To increase welfare assistance and combat poverty, the government offers social assistance to the less fortunate. The purpose of this research assistance is to have an impact on social programs and economic growth in Padang City. The findings of this research show how social assistance influences the way people see themselves in solving problems and escaping the cycle of poverty, while reducing the financial burden in meeting food needs in households that receive food assistance. In addition, as one of their basic rights, it aims to provide greater access to low-income communities to meet their basic food needs*

Keyword: *Poverty, Social Assistance, PKH*

Abstrak: Di Kota Padang, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang signifikan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kebutuhan dasarnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan, pemerintah menawarkan bantuan sosial kepada mereka yang kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh program bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana bantuan sosial mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memecahkan masalah dan melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan, sekaligus mengurangi beban finansial dalam memenuhi kebutuhan pangan pada rumah tangga yang menerima bantuan pangan. Selain itu, sebagai salah satu hak dasar mereka, hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka.

Kata Kunci: Kemiskinan, Bansos, PKH

PENDAHULUAN

Seseorang atau sekelompok orang yang kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan disebut berada dalam kemiskinan. Sejumlah faktor dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan, seperti keadaan hidup, pendapatan, dan akses terhadap layanan penting. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Sebuah inisiatif pemerintah Indonesia, Program Bantuan Sosial (Bansos) bertujuan untuk memberikan dukungan materi atau finansial kepada kelompok yang kurang beruntung atau rentan di masyarakat. Tujuan utama dari program yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan organisasi pemerintah ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan bantuan sosial adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yang mengandung arti bahwa bantuan sosial merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mempunyai manfaat. sumber pendapatan. Beragam program bantuan sosial tersedia, antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sosial Desa. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial memuat peraturan terkait bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diubah dengan peraturan ini. Sesuai definisi hukum, bantuan sosial didefinisikan sebagai dukungan finansial, material, atau non-material yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang terkena dampak, kurang beruntung, dan/atau berisiko terkena masalah sosial. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dengan peraturan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan penekanan studi kasus Kota Padang. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dampak program terhadap tingkat kemiskinan Kota Padang dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak program bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan. Wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner atau panduan wawancara yang dibuat khusus untuk penelitian ini berfungsi sebagai metode pengumpulan data utama. Wawancara terbuka digunakan untuk mengumpulkan data, memberikan responden kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka secara utuh. Setelah pengumpulan data, pendekatan analisis tematik digunakan untuk menentukan temuan-temuan utama mengenai motivasi, komitmen organisasi, keterlibatan anggaran, dan pengaruhnya terhadap kinerja manajemen. Pedoman etika penelitian ditaati secara ketat dalam pelaksanaannya; subjek penelitian memberikan rincian yang cukup dan memberikan persetujuan mereka sebelum ditanyai. Etika ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian diikuti dan untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan selama penyelidikan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Sosial (BANSOS) Kota Padang

Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Sumatera Barat. Angka kemiskinan Sumbar turun dari 6,55% pada tahun 2018 menjadi 5,29% pada tahun 2019 (BPS Sumbar). Tentu saja, pengurangan ini tidak dapat dipisahkan dari inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan natura lainnya yang bertujuan untuk menurunkan garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat serius dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas utamanya. Namun demikian, kebijakan dan program yang telah dilaksanakan belum memberikan hasil terbaik, dan tampaknya tujuan pengentasan kemiskinan dan inisiatif yang lebih spesifik pada sektor tertentu masih berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan terpadu agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Mawar (2019).

Dibandingkan Sumatera Barat dengan daerah pedalaman, angka kemiskinan masih sangat rendah. Namun angka ini masih menyisakan banyak orang dalam kemiskinan. Pergerakan selama lima tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Kondisinya masih relatif datar. (2019, Khairati). Salah satu aspek dari program jaminan sosial adalah program bantuan sosial, yang merupakan cara bagi pemerintah federal atau pemerintah daerah yang benar-benar peduli terhadap masyarakat kurang mampu yang terabaikan di tingkat bawah untuk mewujudkan tanggung jawab mereka. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk menciptakan sistem jaminan sosial bagi setiap orang dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada individu yang lebih lemah dan kurang mampu sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dilaksanakan melalui inisiatif ini.

Terdapat sebelas kecamatan di Kota Padang yang menjadi lokasi penyaluran bantuan sosial yang masing-masing tingkatannya berbeda-beda:

- a. Padang Selatan: 97,98 persen
- b. Padang Timur: 97,88 persen
- c. Padang Barat: 97,51 persen
- d. Padang Utara: 96,09 persen
- e. Bungus Teluk Kabung: 98,37 persen
- f. Lubuk Begalung: 97,10 persen
- g. Lubuk Kilangan: 98,96 persen
- h. Pauh: 96,21 persen
- i. Kuranji: 97,87 persen
- j. Nanggalo: 98,65 persen
- k. Koto Tangah: 97,45 persen

Program Bantuan Sosial (Bansos) berdampak besar terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa penelitian telah menunjukkan keampuhan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program pemberian sosial bersyarat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi sebagai keluarga penerima PKH disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Transfer Tunai Bersyarat (BTB) adalah istilah lain yang digunakan secara global untuk merujuk pada Program Perlindungan Sosial. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan keluarga berpenghasilan rendah—

terutama mereka yang memiliki ibu hamil dan anak—akses terhadap berbagai layanan kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitarnya.

Kementerian Sosial menentukan kelayakan keluarga berpenghasilan rendah untuk mengikuti Program Keluarga Harapan, yang menawarkan dukungan keuangan bersyarat. 30 Masyarakat didorong untuk menggunakan PKH untuk mendapatkan dan mendapatkan manfaat dari layanan sosial penting termasuk makanan, gizi, kesehatan, pendidikan, perawatan, dan dukungan. Mereka juga didorong untuk memanfaatkan PKH untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial tambahan yang merupakan layanan pelengkap yang berkesinambungan. Sebagai landasan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial suatu negara, PKH ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia telah berupaya mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui Kementerian Sosial. Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan arahan yang memperbolehkan bantuan sosial dan subsidi diberikan melalui perbankan secara nontunai. Kepedulian negara terhadap kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Mulai tahun 2017, pemberian bantuan pangan nontunai akan dilakukan secara bertahap di sejumlah daerah di Indonesia yang dipilih secara cermat dan memiliki infrastruktur dan akses yang memadai. Penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui sistem perbankan tidak hanya menawarkan pilihan pangan yang lebih banyak, namun juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan konstruktif dengan mengungkapkan bantuan dan memanfaatkan peluang untuk menghemat uang. Melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan, Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerimanya (Bappenas, 2017).

Pengaruh Program Bansos (BANSOS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang

a. Pengaruh Bantuan PKH Terhadap Kemiskinan Kota Padang

RTSM menerima dana dari program bantuan PKH yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, mereka membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kesehatan dan pendidikan. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat dalam memecahkan masalah dan melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Namun bantuan sosial PKH belum mampu memutus siklus kemiskinan karena masyarakat miskin masih berpikiran sama terhadap keadaan mereka. Bantuan PKH diberikan di bidang kesehatan untuk menjamin kesejahteraan setiap masyarakat, di bidang pendidikan untuk membantu anak menyelesaikan pendidikannya, dan di bidang kesejahteraan untuk PKH bagi lanjut usia (60 tahun ke atas) dan mereka yang berusia lanjut, penyandang disabilitas.

b. Pengaruh Bantuan BPNT Terhadap Kemiskinan Kota Padang

Upaya pemerintah untuk mengurangi beban keuangan masyarakat miskin terlihat dari dukungannya terhadap BPNT. Inisiatif ini diharapkan benar-benar membantu mengubah pola pengeluaran keluarga dengan meningkatkan jumlah makanan dan non-makanan yang dikonsumsi di rumah. Namun pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah besar penerima bantuan pemerintah BPNT tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Inisiatif BPNT diperkirakan akan berdampak pada kebiasaan belanja rumah tangga. Tujuan pemberian subsidi beras kepada

organisasi masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk mengurangi beban keuangan dalam memberikan bantuan pangan kepada mereka yang membutuhkan pangan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kebutuhan pangan dasar karena hal ini merupakan hak asasi manusia

KESIMPULAN

Inisiatif pemerintah Indonesia melalui program Bantuan Sosial (Bansos) bertujuan untuk memberikan dukungan material atau finansial kepada kelompok kurang beruntung atau rentan di masyarakat. Tujuan utama dari program yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan organisasi pemerintah ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Bantuan Sosial (Bansos) berdampak besar terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan banyak inisiatif penelitian yang menunjukkan kemanjuran bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Program-program ini meliputi:

1. Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH)

Program pemberian sosial bersyarat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi sebagai keluarga penerima PKH disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)

Kepedulian negara terhadap kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan, bantuan pangan nontunai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima dan kemampuan pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2017).

Di Kota Padang, Sumatera Barat, program bantuan sosial (BANSOS) termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat, masih terdapat banyak hambatan yang harus diatasi sebelum bantuan kemanusiaan dapat secara efektif mengakhiri siklus kemiskinan. Penilaian terhadap efektivitas dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pangan, masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan sosial dapat menghasilkan transformasi jangka panjang bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Untuk meningkatkan efektivitas program BANSOS Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan, beberapa faktor harus diperhatikan:

1. Integrasi Program

Dukungan koordinasi yang lebih baik diperlukan di berbagai inisiatif sosial, seperti PKH dan BPNT, untuk memaksimalkan dampak gabungan keduanya.

2. Edukasi dan Pemberdayaan

Untuk membantu klien bantuan menjadi lebih mandiri dari waktu ke waktu, ajukan inisiatif untuk meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

3. Monitoring dan Evaluasi

Agar program bantuan sosial apa pun dapat dikembangkan, efektivitas dan dampak sosialnya harus dikomunikasikan melalui sistem pemantauan yang kuat.

4. Keterlibatan Masyarakat

Untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program serta memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, libatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program.

Diharapkan dengan meningkatkan elemen-elemen ini, program BANSOS akan lebih mampu menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang dan menawarkan bantuan yang lebih konkrit kepada mereka yang membutuhkan.

REFERENSI

- Abadi, F., & Kohar, W. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *At-Taghyir*, 3(1), 43–64. <https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/taghyir/article/view/2778>
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Lenggia, Y. (2022). *Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (Bst) Era Pandemi Covid-19 Di Kota Padang* <http://eprints.ipdn.ac.id/8539/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/8539/1/Yozan> Lenggia 29.0248 SKP B-4.pdf
- Mardhatillah, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.* <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/xwezu>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Nurwan, T. W., & Hasan, H. (2020). Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan Keterampilan Pendamping dan Partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2035>
- Putri, N., Yewiwati, Y., & Irfan, M. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. *Ecosains, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 110–117.
- Rosa, Y. Del. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 318. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.113>
- Sun'an, M., Husen, A., Badal, M. A. (2022). Analisis Dampak Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Taliabu Tahun 2015-2021. *Poros Ekonomi*, 13–33. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/porosekonomi/article/view/5267%0Ahttp://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/porosekonomi/article/viewFile/5267/3292>
- Warita, D., Murni, D., & Kurniawati, Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Barat Menggunakan Metode Analisis Jalur. *Journal of Mathematics UNP*, 4(1), 13–18. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/view/11546%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/download/11546/4616>
- Yvanka, V., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Analisis Komparasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Padang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20623>